



SETIA #MelayaniJakarta



JANUARI

M	S	S	R	K	J	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

FEBRUARI

M	S	S	R	K	J	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		

MARET

M	S	S	R	K	J	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

APRIL

M	S	S	R	K	J	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

MEI

M	S	S	R	K	J	S
		1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

JUNI

M	S	S	R	K	J	S
					1	
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

2019

JULI

M	S	S	R	K	J	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

AGUSTUS

M	S	S	R	K	J	S
			1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

SEPTEMBER

M	S	S	R	K	J	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

OKTOBER

M	S	S	R	K	J	S
	1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

NOVEMBER

M	S	S	R	K	J	S
			1	2		
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

DESEMBER

M	S	S	R	K	J	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

JANUARI

M	S	S	R	K	J	S
		1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

FEBRUARI

M	S	S	R	K	J	S
					1	
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

MARET

M	S	S	R	K	J	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

APRIL

M	S	S	R	K	J	S
		1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

MEI

M	S	S	R	K	J	S
				1	2	
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

JUNI

M	S	S	R	K	J	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

2020

JULI

M	S	S	R	K	J	S
		1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

AGUSTUS

M	S	S	R	K	J	S
					1	
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

SEPTEMBER

M	S	S	R	K	J	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

OKTOBER

M	S	S	R	K	J	S
		1	2	3		
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

NOVEMBER

M	S	S	R	K	J	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

DESEMBER

M	S	S	R	K	J	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		



Akronim huruf “P” yang pertama dalam PTSP adalah pelayanan bukan perizinan. Pemilihan kata tersebut menjadi penting karena terdapat perbedaan makna yang sangat mendasar antara kata pelayanan dan perizinan. Kata “perizinan” memiliki makna bahwa masyarakat yang disebut dengan pemohon posisinya ada di bawah atau inferior, sementara pemerintah sebagai pemberi izin ada di atas (kepentingan superior).

Berbeda dengan “perizinan”, makna “pelayanan” menjadikan posisi pemerintah berada di bawah sebagai subjek yang melayani sedangkan posisi masyarakat ada di atas sebagai objek yang dilayani. Pemahaman ini penting agar kita tidak terjebak dalam posisi yang salah (disorientasi posisi). Pada akhirnya, kita tidak pernah bisa membedakan dengan jelas mana yang menjadi hak dan kewajiban. Disorientasi posisi ini berbahaya dan dapat mengantarkan kita kepada kedzaliman.

Menggunakan kata pemerintah dalam instansi yang tugasnya melayani masyarakat memang menyebabkan kerancuan. Dewasa ini, fungsi pemerintah dapat disalahpahami dimana mereka yang banyak memerintah pada akhirnya melupakan bahwa dalam dirinya ada “DNA Pelayanan”. Alhasil, instansi pemerintah tersebut tumbuh besar menjadi penguasa. Menyadarkan para

penguasa bahwa mereka sejatinya ialah pelayan masyarakat merupakan tantangan tersendiri.

Warga Ibukota sudah memiliki masalah dan persoalan yang sedemikian akut terkait masalah perizinan mulai dari masalah zonasi, permodalan dan persyaratan yang memberatkan. Kehadiran PTSP haruslah menjadi konsultan yang memberikan solusi, bukan memposisikan diri sebagai aparat pemerintah yang memberikan kuliah tentang peraturan perundangan yang saling tumpang tindih tanpa bisa memberikan jalan keluar.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki “DNA Pelayanan”, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewajiban melayani dan memberikan kepuasan terhadap warga Jakarta terkait pelayanan perizinan dan non perizinan melalui tata nilai atau credo yang terdiri dari Solusi, Empati, Tegas, Inovasi dan Andal (SETIA). Sejatinya pelayanan publik yang prima merupakan Kebutuhan Dasar dan Hak Sipil setiap Warga Negara yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara negara. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan dan kebahagiaan warga ibukota merupakan komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

Salam SETIA #MelayaniJakarta



TENTANG DPMPTSP PROVINSI DKI JAKARTA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta merupakan Perangkat Daerah yang memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di DKI Jakarta, memiliki 316 service point atau Unit Pelaksana yang tersebar pada Kantor Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi dan Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi cikal bakal terbentuknya PTSP Provinsi DKI Jakarta. Terhitung sejak tanggal 2 Januari 2015, PTSP Provinsi DKI Jakarta diresmikan. Awalnya bernama Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Provinsi DKI Jakarta, seiring perjalanannya dan bertambahnya urusan penanaman modal BPTSP Provinsi DKI Jakarta berganti nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta yang diresmikan pada tanggal 3 Januari 2017 sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



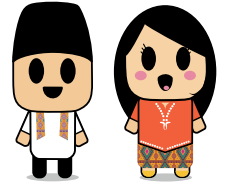




IDENTITAS ORGANISASI

VISI

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta adalah **"Solusi Investasi dan Perizinan di Jakarta"**



MISI

- Meningkatkan nilai investasi melalui promosi, penyempurnaan peraturan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi;
- Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan melalui penciptaan inovasi layanan berbasis sistem teknologi informasi;
- Mengelola pengaduan masyarakat dengan berbasis *quick response*;
- Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai kompetensi;
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan handal

NILAI

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap insan di lingkungan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, meliputi:

- Bercirikan SETIA – Solusi Empati Tegas Inovasi Andal
- Jujur
- Integritas
- Bertanggung Jawab
- Dedikasi
- Disiplin
- Kerjasama
- Pelayanan Prima



SLOGAN ORGANISASI

SETIA:

SETIA merupakan singkatan dari tata nilai (kredo) DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dalam #MelayaniJakarta, yaitu Solusi, Empati, Tegas, Inovasi dan Andal.

Solusi

Cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah secara objektif tanpa adanya tekanan.

Empati

Keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain.

Tegas

Sikap yang berani dan percaya diri mengungkapkan apa yang benar dan apa yang salah secara jelas, nyata dan pasti (tidak samar-samar, tidak ragu-ragu).

Inovasi

Proses kreatif dalam pengalaman terhadap fakta di lapangan menjadi suatu gagasan, ide, metode atau alat yang dapat bernilai menjadi lebih baik.

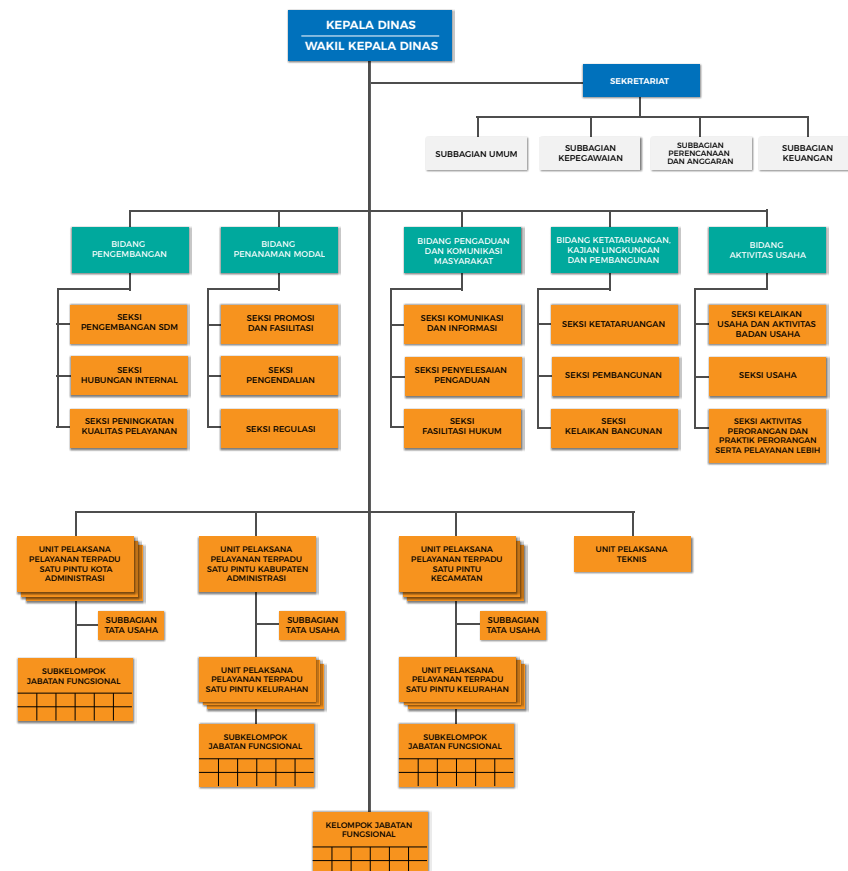
Andal

Dapat dipercaya dan mampu memberikan hasil yang sama dari waktu ke waktu.



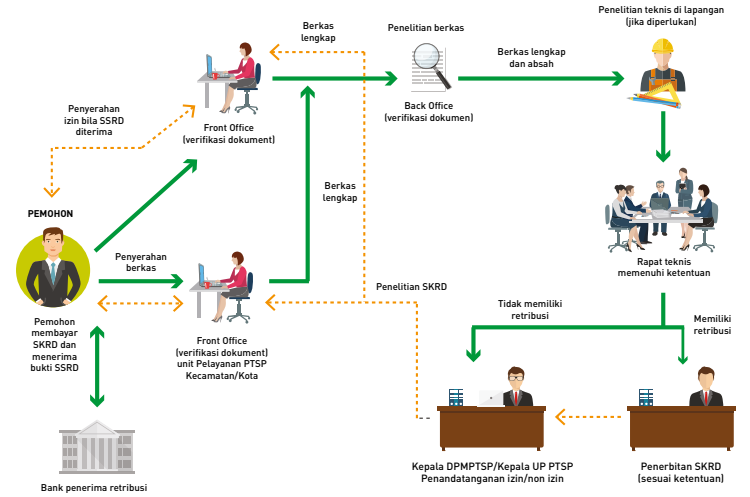


STRUKTUR ORGANISASI





MEKANISME PERIZINAN





MAL PELAYANAN PUBLIK

JENIS-JENIS LAYANAN:

DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta:

- a. Pengajuan perizinan dan non perizinan, persyaratan, prosedur, biaya, mekanisme dan waktu penyelesaian izin/non izin dapat dilihat di website <http://pelayanan.jakarta.go.id>
- b. Konsultasi dan pemberian informasi terkait Perizinan dan Non Perizinan
- c. Jakarta Investment Centre
- d. Gerai Memulai Usaha (Starting a Business Corner)
- e. Layanan Prioritas
- f. Layanan Fast Track

Direktorat Jenderal Pajak:

- a. NPWP
- b. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
- c. Pembukaan Kode Billing
- d. Asistensi Layanan Mandiri
- e. Konsultasi Umum Perpajakan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:

- a. Layanan Nomor Identitas Kepabeanan
- b. Layanan Tracking Barang Kiriman
- c. Layanan Konsultasi Kepabeanan.

Direktorat Jenderal Imigrasi:

- a. Paspor Perpanjangan
- b. Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU):

- a. Pengesahan Perseroan Terbatas
- b. Pengesahan Yayasan
- c. Pengesahan Perkumpulan
- d. Permohonan Company Profile PT, Yayasan dan Perkumpulan
- e. Pendaftaran Notaris
- f. Pendaftaran Fidusia
- g. Pendaftaran Wasiat
- h. Permohonan PPNS

- i. Permohonan Pewarganegaraan
- j. Permohonan Kewarganegaraan
- k. Permohonan Mutual Legal Assistance

Badan Koordinasi Penanaman Modal:

- a. Konsultasi Perizinan Penanaman Modal

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta:

- a. Pengecekan Sertifikat
- b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)
- c. Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT).

Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya:

- a. SIM Perpanjangan
- b. STNK Pengesahan
- c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- d. Surat Keterangan Laporan Kehilangan

Badan Pajak dan Retribusi Daerah:

- a. Pengesahan Pembayaran PKB BBNKB
- b. Mutasi Nama dan Alamat STNK
- c. Proses Pindah Alamat Keluar Daerah STNK
- d. Pajak Hotel
- e. Pajak Restoran
- f. Pajak Hiburan
- g. Pajak Air Tanah
- h. Pajak Parkir
- i. Pajak Reklame
- j. PBB KB
- k. Pajak BPHTB
- l. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- m. UPPRD Setiabudi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

- a. Perekaman KTP Elektronik
- b. Pelayanan Akta Kelahiran
- c. Kartu Keluarga
- d. Informasi Administrasi Kependudukan

Jasa Raharja:

- a. Kolektor Tarif Sumbangan Wajib (SW) dan Verifikasi Untuk Wajib Pajak Yang Membayar Pajak Kendaraan
- b. Klaim Jasa Raharja/Santunan

BPJS Kesehatan:

- a. Pendaftaran Peserta Baru.
- b. Mutasi Data
- c. Informasi dan Pengaduan

BPJS Ketenagakerjaan:

- a. Pendaftaran Peserta Baru Untuk Peserta Penerima Upah (Formal Sektor) dan Bukan Penerima Upah (Informal Sektor)

- b. BPJSSTK Checking
- c. Informasi dan Pengaduan
- d. e-klaim
- e. E-saldo.

PT. PLN:

- a. Pasang Listrik Baru
- b. Perubahan Daya
- c. Pasang Listrik Sementara

Bank DKI:

- a. Layanan Perbankan.

PT Jamkrida Jakarta:

- a. Penjaminan kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

Bazis Provinsi DKI Jakarta



INOVASI DPMPTSP

- a. **JakEVO**, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui platform elektronik atau pelayanan online.
- b. **Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB)**, menjemput berkas persyaratan izin/non izin dan mengantarkan kembali dokumen izin/non izin langsung ke rumah atau kantor pemohon.
- c. **Mobil AJIB atau Mobile Service Unit**, penyelenggaraan PTSP pada ruang publik dengan menggunakan mobil pelayanan yang dilengkapi berbagai sarana dan prasarana dalam memproses izin atau non izin secara langsung.
- d. **Tanya PTSP 1500164**, call center yang memungkinkan pemohon untuk melakukan konsultasi dan permintaan informasi seputar perizinan dan non perizinan melalui telepon, panggilan video dan percakapan langsung atau live chat. Inovasi layanan Tanya PTSP 1500164 juga dikembangkan melalui penayangan program televisi dan talkshow radio untuk menjawab pertanyaan yang pada umumnya diajukan oleh warga Ibukota melalui media sosial.

- e. **Antrian Online dan Lacak Berkas**, memberikan kepastian kepada pemohon perizinan dan non perizinan untuk dilayani sesuai waktu yang telah ditentukan.
- f. **Tanda Tangan Elektronik**, menerbitkan legalitas perizinan dan non perizinan melalui sistem teknologi informasi yang telah disahkan oleh Lembaga Sandi Negara.
- g. **Jasa Arsitek Gratis**, memberikan jasa arsitek gratis bagi perizinan bangunan peruntukan rumah tinggal dengan luasan di bawah 200 meter persegi.
- h. **IMB 3.0**, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) peruntukan rumah tinggal dapat diselesaikan dalam waktu 3 jam dengan persyaratan dan ketentuan berlaku.
- i. **PTSP Goes To Mall**, penyelenggaraan PTSP pada ruang publik dengan melakukan sinergi antara pemerintah (pusat dan daerah), pelaku usaha dan masyarakat. Dalam perjalanannya Inovasi layanan ini terus dikembangkan bukan hanya di pusat perbelanjaan atau mall, melainkan juga dilaksanakan di tempat-tempat pusat kegiatan masyarakat lainnya, seperti di Pusat Perkantoran, Pasar, Rumah Sakit, Taman, RPTRA, Sekolah, Kampus hingga Pelayanan Terpadu Keliling Kampung Kota yang secara langsung hadir di lingkungan warga. Tercatat, lebih dari 300 kegiatan PTSP pada Ruang Publik akan dilaksanakan sepanjang tahun 2019 ini.
- j. **Pelayanan Terpadu Keliling Kepulauan Seribu**, menyelenggarakan PTSP bersama dengan Unit Layanan lainnya baik pemerintah pusat, pemerintah

daerah maupun swasta secara langsung ke pulau-pulau pemukiman atau padat penduduk yang ada di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- k. **Gerai Memulai Usaha atau Starting a Business Corner**, layanan konsultasi pengurusan perizinan dan administrasi lainnya dalam memulai kegiatan usaha di Jakarta. Petugas Profesional DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan asistensi langsung kepada pemohon dan menjadi penghubung antara pengusaha dengan berbagai instansi baik pusat, daerah, BUMN, BUMD maupun swasta terkait kegiatan memulai usaha. Mengawal permohonan dari proses pengajuan perizinan sampai dengan dokumen izin diterbitkan (end to end process) untuk memastikan kegiatan usaha pemohon mendapatkan legalitas dan perlindungan hukum.
- l. **Jakarta Investment Centre (JIC)**, menyajikan Informasi potensi investasi yang siap ditawarkan baik melalui Business to Business maupun melalui skema Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) serta potensi investasi lainnya untuk didorong menjadi realisasi investasi yang nyata di Jakarta.
- m. **Jakarta Virtual Consultant For Business (JVC for BI)**, penggunaan aplikasi teknologi informasi yang memungkinkan pemohon untuk dapat melihat potensi dan lokasi yang memungkinkan di Ibukota untuk melakukan kegiatan investasi, secara real time.



PENCAPAIAN DPMTSP

DPMTSP Provinsi DKI Jakarta terus melakukan inovasi layanan yang memudahkan dan mendekatkan layanan kepada masyarakat.

1. Realisasi Investasi DKI Jakarta periode tahun 2018 menembus angka Rp. 114,2 triliun dengan Realisasi Investasi PMDN tertinggi di Indonesia berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
2. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMTSP Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 mencapai 6.265.640 pelayanan izin/ non izin, meningkat 17,5 % dari tahun 2017 sebanyak 5.330.060
3. Jumlah penerimaan Retribusi dan PAD lain-lain selama tahun 2018 sebesar Rp. 583,2 miliar
4. Jumlah pengguna layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) selama tahun 2018, sebanyak 142,456 pemohon
5. Jumlah pengguna layanan Tanya PTSP 1500164 baik melalui telepon maupun video call selama tahun 2018, mencapai 163.132 pemohon
6. Akhir tahun 2018, seluruh jenis perizinan dan non perizinan kewenangan DPMTSP Provinsi DKI Jakarta (100%) sudah dapat dilakukan pelayanan online melalui jakevo.jakarta.go.id dan pelayanan.jakarta.go.id
7. Pada Tahun 2018, Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan DPMTSP Provinsi DKI Jakarta sebesar 97,81 % masyarakat puas dengan layanan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 92,05.





**URUS
IZIN
SENDIRI
ITU**

MUDAH

SETIA #MelayaniJakarta